

BAB II

PERKEMBANGAN INVESTASI ASING DI WILAYAH JAWA TENGAH SEBELUM GANJAR PRANOWO

Investasi sangat berperan penting dalam proses pembangunan ekonomi negara-negara berkembang. Lalu lintas modal antar negara di dunia akan terus meningkat berdasarkan dinamika perkembangan zaman. Untuk itu banyak negara terutama negara berkembang yang membuka diri untuk investor yang akan menanamkan modalnya. Investasi yang dilakukan ada dua macam, yaitu investasi asing dan investasi lokal. Suatu negara tidak dapat lepas dari aktivitas perekonomian nasional, dalam hal ini investasi merupakan salah satu komponen penting dalam aktivitas perekonomian.

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah bisa dilihat laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam Negara tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk Negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita.¹

Provinsi Jawa Tengah ialah provinsi yang terletak di tengah pulau Jawa ini masih membutuhkan banyak modal untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah otonom diberikan wewenang untuk mandiri, bagaimana suatu daerah bertahan tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kemandirian suatu daerah diukur melalui Investasi dari penanaman modal asing (PMA) di suatu daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya dibutuhkan nilai investasi asing yang besar, namun juga perlu memperhitungkan seberapa banyak penyerapan tenaga kerja dari nilai investasi asing yang ditanamkan.

¹ Roeslan Zaris, *Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta LPFE UI. 1987 .

Pembangunan ekonomi suatu daerah selalu diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. pada bab dua ini menjelaskan tentang perkembangan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah sebelum kepemimpinan Ganjar Pranowo. Pada sub bab pertama menjelaskan mengenai perkembangan investasi asing pada masa pemerintahan Gubernur Ali Mufiz, pada sub bab kedua menjelaskan tentang perkembangan investasi pada masa pemerintahan Gubernur Bibit Waluyo.

A. Perkembangan Investasi Asing Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Mufiz

Kelancaran pembangunan daerah di Jawa Tengah pada hakekatnya ialah menggunakan segala macam bentuk potensi yang dimiliki baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya modal yang dapat berupa keuntungan yang didapat dari kegiatan investasi asing, yang memiliki tujuan luhur untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Kegiatan penanaman modal di Jawa Tengah dapat memberikan pengaruh terhadap banyak terciptanya lapangan pekerjaan, tingkat pertumbuhan ekonomi dan menyumbang pemasukan bagi pemerintah pusat atau daerah. Untuk mencari sumber pendapatan yang digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan segala macam potensi daerah yang dimilikinya. Otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah lebih mandiri dalam mencari sumber pendapatan daerah. Hal ini sangat disadari oleh Gubernur Ali Mufiz yang menggantikan Mardiyanto sebagai Gubernur sebelumnya untuk lebih berani membuka diri dan memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki kepada investor asing agar bernilai ekonomi yang tinggi. Banyaknya sejumlah investor yang berinvestasi di wilayah Jawa Tengah diharapkan mampu meningkatkan pemasukan daerah yang bukan berasal dari pajak dan didukung juga oleh sejumlah regulasi yang pro investasi asing.

1. Bentuk dan Nilai Investasi Asing

Sebagai Provinsi yang memiliki luas wilayah terluas di Pulau Jawa dan memiliki jumlah kepadatan penduduk terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ali Mufiz² untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di Jawa Tengah memanfaatkan segala macam potensi yang ada baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan penanaman

² Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2009 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013*. Hal 7.

modal asing. di bawah kepemimpinan Ali Mufiz pemanfaatan yang berasal dari penanaman modal asing menjadi fokus utama. Pemanfaatan yang berasal dari penanaman modal asing dinilai sangat tepat dan efektif. Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2007 sebesar Rp 312.428.807.090.000. jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 sebesar Rp 281.996.709.110.000 jumlah ini mengalami peningkatan. PDRB ditahun 2007 berdasarkan harga konstan tersebut lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2000 sebesar Rp. 159.110.253.770.000. dan di tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp. 150.682.654.740.000.

Tabel 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah Tahun 2002-2006

No	Sektor	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	33.668.128,27	33.813.526,67	38.492.121,60	44.806.485,33	57.364.981,87
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.407.809,14	1.668.788,52	1.855.129,61	2.276.913,64	2.869.481,96
3.	Industri Pengolahan	48.176.165,61	56.032.110,15	63.136.583,39	79.037.442,65	92.646.434,52
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	1.544.504,66	2.009.245,97	2.361.913,35	2.815.653,83	3.153.227,05
5.	Bangunan	7.393.911,77	8.891.130,37	10.899.131,66	13.517.731,95	15.962.321,08
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	31.830.470,70	35.660.587,41	38.870.547,20	46.694.123,55	55.362.794,99
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7.924.190,39	9.899.168,22	10.959.329,41	13.852.018,07	16.801.494,45
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5.767.937,39	6.448.270,23	7.212.976,80	8.339.491,61	9.592.396,78
9.	Jasa-jasa	14.255.707,94	17.459.049,51	19.647.530,03	23.095.462,68	28.243.576,41
	PRDB Total	151.968.825,74	171.881.877,04	193.435.263,05	234.435.323,31	281.996.709,11

Sumber: *RPJMD Jawa Tengah*.³

Tabel 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah

No	Sektor	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	27.725.086,08	27.157.595,62	28.606.237,28	29.924.642,25	31.002.199,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	1.227.651,53	1.295.356,44	1.330.759,58	1.454.230,59	1.678.299,61
3.	Industri Pengolahan	39.193.652,64	41.347.172,12	43.995.611,83	46.105.706,52	48.189.134,86
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	975.868,80	980.306,54	1.065.114,58	1.179.891,98	1.256.430,34
5.	Bangunan	6.116.817,45	6.907.250,46	7.448.715,40	7.960.948,49	8.446.566,35
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	26.289.742,59	27.666.472,01	28.343.045,34	30.056.962,75	31.816.441,85
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.872.915,88	6.219.922,79	6.510.447,43	6.988.425,43	7.451.506,22
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.524.128,37	4.650.861,38	4.826.541,38	5.067.665,70	5.339.608,70
9.	Jasa-jasa	11.112.677,79	12.941.524,67	13.663.399,59	14.312.739,85	15.442.467,70
	PRDB Total	123.036.541,13	129.166.462,45	135.789.872,31	143.051.213,88	150.682.654,74

Sumber: *RPJMD Jawa Tengah*.⁴

³ Ibid., Hal 8.

⁴ Ibid., Hal 9

Tabel 2.3. PDRB Per Kapita Jawa Tengah Tahun 2002-2006

No	Tahun	PDRB Perkapita ADH Berlaku	PDRB Perkapita ADH konstan 2000
1.	2002	4.795.199,68	3.882.338,17
2.	2003	5.362.453,91	4.029.797,75
3.	2004	5.970.697,59	4.191.377,78
4.	2005	7.123.777,44	4.346.891,91
5.	2006	8.763.722,89	4.682.824,26
6.	2007	9.648.737,34	4.913.801,20

Sumber: RPJMD Jawa Tengah.⁵

Pada tahun 2006 PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 8.763.722,89. Jika menurut harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 4.682.824,26. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2005. PDRB per kapita tahun 2005 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 7.349.965,06. Berdasarkan harga konstan 2000 PDRB per kapita sebesar Rp 4.484.910,42.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2002 hingga tahun 2006 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan positif dapat terlihat pada kontribusi ekonomi terhadap PDRB walaupun masih ada beberapa sektor yang mengalami penurunan kontribusi. Secara umum sektor-sektor pendukung utama perekonomian Jawa Tengah mengalami peningkatan.

Tabel 2.4. Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Jawa Tengah

No	Sektor	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	4,95	-2,05	5,33	4,61	3,60
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,13	5,51	2,73	9,28	15,41
3.	Industri Pengolahan	5,46	5,49	6,41	4,80	4,52
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	11,83	0,45	8,65	10,78	6,49
5.	Bangunan	10,56	12,92	7,84	6,88	6,10
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,85	5,24	2,45	6,05	5,85
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	5,30	5,91	4,67	7,34	6,3
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2,35	2,80	3,78	5,00	6,55
9.	Jasa-jasa	-6,05	16,46	5,58	4,75	7,89
PRDB Total		3,55	4,98	5,13	5,35	5,33

Sumber: RPJMD Jawa Tengah.⁶

⁵ Ibid., Hal 9

⁶ Ibid., Hal 9

Dalam periode tahun 2002 hingga 2006 sektor industri pengolahan masih menjadi sektor andalan dan mendominasi diantara beberapa sektor lainnya. Sektor industri pengolahan menyumbang terhadap total PDRB Provinsi Jawa Tengah di atas 30 persen. Diantara sektor-sektor lain yang menyumbang cukup besar ialah sektor perdagangan, pertanian, hotel dan restoran yaitu masing-masing sebesar 21,11 persen dan 20,57 persen terhadap PDRB. Sektor yang memberikan sumbangan terkecil terhadap PDRB ialah sektor listrik, air minum dan gas sebesar 0,83 persen,

Tabel 2.5. Distribusi PDRB Harga Konstan Jawa Tengah (2002-2006)

No	Sektor	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	22,53	21,03	21,07	20,92	20,57
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,00	1,00	0,98	1,02	1,11
3.	Industri Pengolahan	31,85	32,01	32,40	32,23	31,98
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,79	0,76	0,78	0,82	0,83
5.	Bangunan	4,97	5,35	5,49	5,57	5,61
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,37	21,42	20,87	21,01	21,11
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,77	4,82	4,79	4,89	4,95
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,68	3,60	3,55	3,54	3,58
9.	Jasa-jasa	9,03	10,02	10,06	10,01	10,25
	PRDB Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: RPJMD Jawa Tengah.⁷

Yang menjadi fokus utama pembangunan ekonomi Jawa Tengah ialah sektor industri, sektor industri dikelompokkan menjadi empat tingkatan. Yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang dan industri besar. Banyaknya jumlah industri sedang dan besar di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2005 sebanyak 3476 perusahaan dengan total menyerap 555.230 angkatan kerja.⁸ Perkembangan dan laju perekonomian daerah tidak lepas dari manfaat yang diberikan dari sejumlah investasi asing yang ditanamkan di Jawa Tengah. Penerimaan dan realisasi investasi dari tahun 2003-2006 mengalami fluktuatif. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 2006 berdasarkan Surat Persetujuan Tetap (SPT) yang telah disetujui sebesar Rp 4,558 triliun dengan menyerap jumlah angkatan kerja sebanyak 18 ribu orang. Realisasi Penanaman Modal Asing berdasarkan SPT dan telah disetujui sebesar US\$ 579,231 dengan

⁷ Ibid., Hal 10

⁸ Ibid., Hal 11

menyerap jumlah angkatan kerja sebanyak 8 ribu orang. Di tahun 2007, kondisi perekonomian Jawa Tengah cukup berhasil melewati permasalahan yang ada sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi selama dua kali sejak tahun 2005. Efek dari kenaikan BBM secara berkelanjutan dapat ditanggulangi dengan baik. perkembangan harga-harga menunjukkan angka stabil. Hal ini dapat dilihat dari tingkat angka laju infasi Jawa Tengah ditahun 2007 sebesar 6,24 persen dan ditahun 2006 sebesar 6,50 persen. Angka tersebut cukup relatif rendah. Karena ditahun tersebut sejumlah harga dan barang kebutuhan pokok mengalami tren kenaikan harga pasar. Harga dan tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan baik dibawah kepemimpinan Ali Mufiz.

Pada tahun 2007 harga semakin stabil dan dapat dikendalikan dengan baik, akan berdampak pada meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Berdasarkan kalkulasi PDRB Jawa Tengah pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,59 persen. Jika dibandingkan pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,33 persen. Dari sektor produksi, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif. Pada sektor bangunan dan konstruksi mengalami peningkatan sebesar 7,21 persen, pada sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 2,78 persen, pada sektor perdagangan dan jasa mengalami peningkatan sebesar 6,54 persen, pada sektor pertambangan mengalami peningkatan sebesar 6,23 persen, pada sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan sebesar 8,07 persen, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 5,56 persen, jasa keuangan dan bank mengalami peningkatan sebesar 6,81 persen dan jasa-jasa lain mengalami peningkatan sebesar 6,71 persen. Jika dilihat dari sisi sektor konsumsi, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah banyak dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 4,80 persen pada tahun 2006 dan sebesar 5,13 persen pada tahun 2007. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa daya beli masyarakat Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2006 hingga tahun 2007. Konsumsi pemerintah pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 12,51 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 12,90 persen, sedangkan pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 12,26 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,67 persen.

Tabel 2.6. Pertumbuhan Sektor PDRB Jawa Tengah Tahun 2006-2007 Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor	Pertumbuhan	
		2006	2007
1	Pertanian	3,60	2,78
2	Pertambangan dan Penggalian	15,41	6,23
3	Industri Pengolahan	4,52	5,56
4	Listrik, Gas dan Air Minum	6,49	6,72
5	Bangunan	6,10	7,21
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	5,85	6,54
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,63	8,07
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,55	6,81
9.	Jasa-jasa	7,89	6,71
Pertumbuhan ekonomi seluruh sektor		5,33	5,59

Sumber: RPJMD Jawa Tengah.⁹

Berdasarkan pada tabel 2.7 yang memberikan rincian terhadap beberapa indikator ekonomi makro Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2007. Beberapa rincian indikator ekonomi makro menunjukkan perkembangan yang positif. Akan tetapi perlu dicermati bahwa penurunan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN akan memiliki dampak secara langsung terhadap penyerapan angkatan kerja

Tabel 2.7. Indikator Ekonomi Makro Jawa Tengah Tahun (2006-2007)

No	Indikator	Tahun 2006	Tahun 2007
1.	PDRB :		
	Atas dasar harga berlaku (Milyar Rupiah)	281.996,71	312.428,81
	Atas dasar harga konstan 2000 (Milyar Rupiah)	150.682,65	159.110,25
2	PDRB/kapita		
	Atas harga berlaku (Juta Rupiah)	8,78	9,65
	Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rp.)	4,69	4,91
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,33	5,59
4.	Inflasi (%)	6,50	6,24
5.	Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) (Trilyun Rp)	48,52	55,16
6.	Perkembangan Persetujuan Investasi :		
	a. PMDN (Milyar Rupiah)	3.820,00	1.190,00
	b. PMA (Juta US \$)	142,39	317,17
7.	Perkembangan Realisasi Investasi :		
	a. PMDN (Milyar Rupiah)	5.070,31	348,93
	b. PMA (Juta US \$)	385,79	106,63
8.	Ekspor (US \$ milyar)	3,11	2,64
9.	Impor (US \$ milyar)	6,27	5,27

Sumber: RPJMD Jawa Tengah.¹⁰

Dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 perkembangan realisasi investasi di Jawa Tengah mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2003 hingga tahun 2005

⁹ Ibid., Hal 13

¹⁰ Ibid., Hal 12

realisasi investasi di provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2006 hingga pada tahun 2007 realisasi investasi di provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Bila mengacu dan berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 jumlah realisasi investasi sebesar Rp. 22.850.322.692.030. pencapaian realisasi investasi selama 2003-2008 sebesar 162,97 persen. sampai Desember 2008 realisasi investasi untuk PMA sebanyak 34 proyek dengan nilai investasi mencapai US\$ 39,223 juta dan Rp. 588,739 Milyar. Sedangkan investasi PMDN sebanyak 14 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 880,422 Milyar. Perkembangan rencana investasi PMDN dan PMA dari tahun 2003 hingga tahun 2008 secara keseluruhan sebesar Rp 70.114.971.569.250. pencapaian kinerja rencana investasi selama tahun 2003 hingga pada tahun 2008 jika dibandingkan dengan kebutuhan investasi sebesar 362,71 persen. Hingga pada bulan Desember 2008 rencana investasi di Jawa Tengah untuk PMA sebesar 58 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 1,932 Milyar. Dan untuk PMDN sebesar 14 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 2,518 Trilyun. Sedangkan jika mengacu pada target yang sudah direncanakan pada tahun 2008 target investasi sebesar Rp 4,016 trilyun

Investasi ialah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat digunakan sebagai modal pembangunan. Pada tahun 2006 realisasi investasi untuk PMDN Sebesar Rp. 5, 07 Triliun dan mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar Rp. 348,93 Milyar. Pada tahun 2006 realisasi untuk PMA sebesar Rp. 385,79 dan mengalami penurunan pada tahun 2007 sebesar Rp. 106,63 Milyar. Persetujuan hingga pada tahap realisasi investasi tahun 2006 menunjukkan peningkatan, pada tahun 2006 persetujuan sebesar Rp. 3,82 Triliun menjadi Rp. 5,07 Triliun. Akan tetapi pada tahun 2007 mengalami penurunan dari persetujuan Rp. 1,19 Triliun yang tercapai hanya Rp. 348,93 untuk PMDN. Untuk PMA pada tahun 2006 mengalami penurunan persetujuan investasi dari Rp. 385,79 Milyar menjadi Rp. 142,39 Milyar. Pada tahun 2007 turun dari Rp. 317,17 Milyar menjadi Rp. 106,63 Milyar.¹¹

2. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Ali Mufiz, berbagai macam permasalahan muncul terkait dengan penanaman modal baik asing maupun dalam

¹¹ Ibid., Hal 71

negeri. Permasalahan pertama yaitu pencapaian penerimaan investasi tidak sesuai dengan target dan belum optimal, hal ini dikarenakan karena tidak adanya promosi yang serius untuk mempromosikan komoditas unggulan yang berasal dari Jawa Tengah. permasalahan yang kedua yaitu belum adanya koordinasi yang baik antar lembaga yang memiliki wewenang dibidang penanaman modal sehingga mengakibatkan pemerintah Jawa Tengah dengan para investor tidak menemui kesepakatan secara resmi dan jelas. Permasalahan yang ketiga ialah belum adanya produk regulasi dan payung hukum yang benar-benar mendukung diadakannya penanaman modal di wilayah Jawa Tengah, kebanyakan produk regulasi terkesan dibuat secara tergesa-gesa. Permasalahan yang keempat ialah kondisi keamanan di wilayah Jawa Tengah pada masa itu belum kondusif hal ini ditandai dengan tingginya angka kriminal yang terjadi di provinsi Jawa Tengah. permasalahan yang kelima ialah belum tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan minimnya pemahaman tentang kegiatan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ialah memberikan fasilitas kepada daerah yang memiliki potensi dengan cara mempromosikan ke luar negeri, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan, meningkatkan sumber daya pendukung yang memiliki keterkaitan dengan investasi. Beberapa indikator yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengatasi permasalahan investasi asing di Jawa Tengah.

- 1) Program promosi

Indikator pencapaiannya memberikan data yang valid baik secara kualitas maupun kuantitas kepada calon investor bisa berupa profil daerah, profil potensi daerah, event promosi, seminar internasional mengenai paparan peluang investasi di Jawa Tengah, updating postingan website yang berkaitan dengan peluang investasi asing di Jawa Tengah dan terjadinya peningkatan sejumlah kesepakatan investasi

- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan

Indikator pencapaiannya terbentuknya sejumlah regulasi undang-undang yang pro investasi, menciptakan keamanan dan ketertiban agar angka terhadap gangguan keamanan investasi dapat ditekan. Tercapainya realisasi investasi pada

tahun 2008 sebesar Rp. 40,156 Triliun, tahun 2009 sebesar Rp. 46,157 Triliun, tahun 2010 sebesar Rp. 55,502 Triliun, tahun 2011 sebesar Rp. 68,613 Triliun, tahun 2012 sebesar Rp. 84,970 Triliun dan tahun 2013 sebesar Rp. 105,384 Triliun. Dan terciptanya predikat daerah yang pro investasi.

3) Meningkatkan sumber daya pendukung investasi

Indikator pencapaiannya tersedianya infrastruktur penunjang dan pendukung untuk melancarkan investasi (jalan, listrik, pelabuhan, bandar udara, dan rel kereta api), tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan terdidik yang mengerti akan pentingnya manfaat dari diadakannya investasi tersebut, dan adanya kesadaran dari sebagian besar masyarakat Jawa Tengah untuk ikut serta berperan dalam mensukseskan investasi asing di Jawa Tengah.

B. Perkembangan Investasi Asing Pada Masa Pemerintahan Bibit Waluyo.

Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah dalam upaya pembangunan tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator penting untuk pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan menentukan arah kebijakan pembangunan untuk periode yang akan datang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB akan menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target laju pertumbuhan yang tinggi didalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahunnya. Hal ini dapat terpenuhi lewat peningkatan output secara agregat baik barang maupun jasa atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya. Jadi, menurut ekonomi makro, pengertian pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alat untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi diyakini

masih menjadi indikator penting dalam menentukan arah pembangunan. Tingkat keberhasilan pembangunan tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya yang digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto.

Investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Penanaman modal merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merupakan langkah awal dari suatu kegiatan produksi. Penanaman modal diarahkan untuk menggantikan peranan dari utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian.¹²

Penanaman modal sendiri tidak serta merta dapat direalisasikan begitu saja, melainkan harus berlandaskan Undang-undang yang berlaku tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Selain itu, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut penanaman modal tersebut juga diperlukan. Karena dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah tersebut diharapkan mampu mendorong bertambahnya penanaman modal baik PMA, PMDN maupun penanaman modal lain.

1. Bentuk dan Nilai Investasi

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pemanfaatan sumber daya modal atau investasi memiliki peranan yang sangat vital dalam sebuah proses pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan perekonomian. Hal ini didukung oleh fenomena globalisasi yang menyamarkan batas kedaulatan sebuah negara. Arus mobilisasi barang, jasa dan modal antar negara menjadikan setiap negara yang ada di dunia berusaha meningkatkan kerjasama di berbagai bidang untuk memperoleh keuntungan dan mencapai kepentingannya. Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia sepakat untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya. Tentunya mekanisme penanaman modal harus sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, jumlah investor PMA dan PMDN,

¹² Djoko Sarwono, *Analisis PMA dan PMDN di Jawa Tengah Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*. Tesis. Semarang : Universitas Diponegoro. 2004.

jumlah persetujuan proyek, jumlah nilai realisasi investasi dan rasio penyerapan angkatan kerja dari tahun 2008 hingga tahun 2012 menunjukkan kondisi yang fluktuatif

Tabel 2.8. Jumlah Investor PMA dan PMDN di Jawa Tengah Berdasarkan Izin Usaha (2008-2012)

Tahun	Jumlah Investor/ Perusahaan		
	PMA	PMDN	Jumlah
2008	10	28	38
2009	3	27	30
2010	9	16	25
2011	16	27	43
2012	13	17	30

Sumber: RPJMD Jateng.¹³

Selama periode tahun 2008 hingga tahun 2010, nilai, realisasi investasi dan persetujuan proyek mengalami fluktuasi. Realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah ditahun tersebut mengalami peningkatan dari Rp. 2,716 Triliun (tahun 2008) menjadi Rp. 8,320 Triliun (tahun 2010). Ditahun 2011 terjadi penurunan nilai investasi sebesar Rp. 6,414 Triliun. Ditahun 2012 menjadi Rp. 2,993 Triliun. Sebab utama terjadinya keadaan fluktuatif tersebut dikarena oleh pihak investor mempertimbangkan regulasi yang telah dibuat di wilayah Jawa Tengah apakah menghambat kegiatan investasi yang akan dilakukan, ketersediaan lahan, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kurangnya koordinasi antar birokrasi di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, kurangnya infrastruktur pendukung, kurangnya pemahaman disebagian besar masyarakat Jawa Tengah tentang arti penting dan manfaat dari investasi tersebut dilakukan.

¹³ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 5 Tahun 2014 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*. Hal II-119

Tabel 2.9. Nilai Investasi PMDN dan PMA Di Provinsi Jawa Tengah Tahun (2008-2012)

Tahun	Persetujuan		Realisasi Izin Usaha Tetap	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Trilyun)
2008	86	22,312	50	2,716
2009	81	48,037	36	3,510
2010	125	7,242	46	8,320
2011	166	26,698	64	6,414
2012	131	55,808	48	2,993

Sumber: RPJMD Jateng.¹⁴

Jumlah angkatan kerja yang terserap dalam PMA dan PMDN dari tahun 2008 hingga pada tahun 2012 cenderung meningkat. Rasio daya serap angkatan kerja sebesar 396 orang per perusahaan pada tahun 2008 dan angkatan kerja sebesar 1.511 orang per perusahaan pada tahun 2012.

Tabel 2.10. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah (2008-2012)

Uraian	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN	15.052	6.885	12.794	19.785	45.322
Jumlah seluruh PMA/PMDN	38	30	25	43	30
Rasio daya serap tenaga kerja	396	230	512	460	1.511

Sumber: RPJMD Jateng.¹⁵

Pada tahun 2009 realisasi PMDN sebesar Rp. 2.570,34 Milyar meningkat 92,34 persen dari tahun 2008. Pada tahun 2010 realisasi PMDN mengalami peningkatan dari Rp. 2.825,40 Milyar dari tahun 2009, akan tetapi terjadi penurunan sebesar 9,92 persen. Realisasi tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.430 Milyar (127,58 persen) dari tahun 2010. Realisasi tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.633,95 Milyar dengan persentase penurunan sebesar 74,59 persen.

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Ibid., Hal II-120

Tabel 2.11. Nilai Realisasi PMDN dan Pertumbuhan Realisasi PMDN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012

uraian	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai Realisasi PMDN (Rp.Milyar)	1.336,34	2.570,34	2.825,40	6.430,00	1.633,95
Pertumbuhan realisasi PMDN (%)	383,36	92,34	9,92	127,58	74,59

Sumber: RPJMD Jateng.¹⁶

Tabel 2.12. Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah (2008 – 2012)

No.	Indikator	Target SPM 2014	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor /Bidang Usaha Unggulan (sektor/ bidang usaha/tahun)	1	-	-	-	-	1
2	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Kemitraan UMKM dan Koperasi dengan Pengusaha Nasional/Asing (kali/ tahun)	1	3	3	3	4	6
3	Jumlah Promosi Peluang Penanaman Modal provinsi (kali/tahun)	1	3	3	5	4	6
4	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal: Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja lebih di 1 (satu) kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah provinsi(%).	100	-	-	-	60	60
5	Terselenggaranya bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha (kali/kali)	1	2	2	2	2	2
6	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) (%)	100	-	-	-	75	75
7	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha (kali)	1	2	2	2	3	3

Sumber: RPJMD Jateng.¹⁷

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid., Hal II-121

Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi investasi di Provinsi Jawa Tengah. Faktor yang pertama secara internal meliputi kemudahan dalam perizinan, kualitas pelayanan, upah tenaga kerja dan buruh, mekanisme promosi investasi, kualitas sumber daya manusia yang masih minim tentang pemahaman investasi, regulasi yang dinilai menghambat investasi, infrastruktur pendukung yang masih belum baik. Faktor yang kedua secara eksternal meliputi tingkat suku bunga kredit, inflasi, kondisi keamanan, peluang pasar, budaya politik uang, nilai tukar rupiah dan kebijakan nasional yang tidak sejalan dengan perekonomian global. Dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. hal ini dapat terlihat dari 7 indikator SPM yang ditargetkan pada tahun 2014, 6 indikator telah tercapai di tahun 2012.

Untuk mendukung kinerja urusan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 51 Tahun 2012. Dalam hal kelembagaan dan birokrasi, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 74 Tahun 2012. UPT PTSP berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan untuk memudahkan para investor yang ingin berinvestasi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2012, pelayanan perizinan yang dikeluarkan seperti Izin Prinsip dan Izin Usaha. Pelayanan non-perizinan yang dikeluarkan seperti Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dan Angka Pengenal Importir Produsen. Pelayanan non-perizinan masih dilakukan oleh instansi teknis. Pada tahun 2014 pelayanan non perizinan dapat dilayani oleh UPT PTSP. Kegiatan penanaman modal di Jawa Tengah didukung dengan adanya unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebar di 35 Kabupaten/Kota

2. Iklim investasi

Terciptanya iklim investasi yang kondusif diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. namun dalam prakteknya masih belum optimal untuk meningkatkan jumlah investor yang masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2011 jumlah investor yang masuk di

wilayah Jawa Tengah sebanyak 64 investor. Pada tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 48 investor masuk ke wilayah Provinsi Jawa Tengah. permasalahan pada pengembangan iklim investasi meliputi kurangnya informasi mengenai potensi daerah, minimnya promosi daerah yang memiliki potensi investasi, masih minimnya sumber daya manusia yang mengerti tentang manfaat investasi, terjadinya konflik kepentingan antar birokrasi di instansi pemerintahan yang berada di Provinsi Jawa Tengah, belum adanya lembaga atau instansi yang fokus dan berwenang di bidang penanaman modal, dan masih sulitnya pengurusan perizinan.

3. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Reformasi birokrasi mutlak dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan transparansi pemerintahan kepada masyarakat. Pada masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Reformasi Birokrasi mulai diterapkan di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. segala aspek mulai dibenahi dan diperbaiki. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan peran serta masyarakat akan menciptakan iklim yang kondusif. Tidak adanya pembatas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat merupakan tujuan luhur dari sistem demokrasi yang selama ini kita anut. Jika reformasi birokrasi berhasil dilakukan maka akan mendukung kegiatan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah.

4. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran

Sebagai Provinsi yang memiliki wilayah terluas dan jumlah kepadatan penduduk terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta terdapat permasalahan tersendiri bagi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. khususnya di bidang kependudukan. Sebagian besar penduduk yang tinggal dan tersebar di Provinsi Jawa Tengah bekerja pada sektor Pertanian. Terlalu banyaknya sejumlah penduduk yang berkerja pada sektor pertanian akan berpengaruh pada angka produktifitas dan angka penyerapan angkatan kerja yang terpusat di sektor pertanian. Perlunya peningkatan keterampilan kerja diharapkan untuk dapat mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera. Sebagai daerah yang memiliki berbagai macam potensi investasi. Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di Jawa Tengah, dengan harapan tujuan dari penanaman modal yang dilakukan di Provinsi Jawa Tengah ialah untuk menciptakan sejumlah lapangan kerja yang baru. Dan sebagian besar masyarakat yang tinggal dan tersebar di Provinsi Jawa Tengah tidak selalu mengandalkan pekerjaan mereka pada sektor pertanian.

5. Keterkaitan isu strategis, visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2010 – 2014

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sejalan dengan Visi dan Misi Indonesia tahun 2014. Visi Indonesia Tahun 2014 ialah mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Misi Indonesia Tahun 2014 ialah melanjutkan pembangunan untuk Indonesia yang sejahtera, memperkuat pilar demokrasi, memperkuat rasa keadilan disemua bidang. Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Indonesia Tahun 2014 terdapat sebelas prioritas nasional yaitu infrastruktur, reformasi birokrasi, ketahanan pangan, pengurangan angka kemiskinan, kesehatan, pendidikan, iklim investasi usaha, ketahanan energi, lingkungan hidup dan bencana, daerah tertinggal terluar terdepan dan paska konflik, kebudayaan, kreatifitas inovasi teknologi. Iklim investasi usaha menjadi salah satu point penting dalam visi misi pembangunan nasional dan pembangunan provinsi Jawa Tengah

6. Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah

- a. peningkatan kerjasama investasi dan promosi daerah. Dengan beberapa indikator yang akan dicapai ialah promosi peluang penanaman modal provinsi, kerjasama kemitraan UMKM dan koperasi pengusaha nasional atau asing.
- b. peningkatan realisasi investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan beberapa indikator yang akan dicapai ialah Jumlah investor PMA dan PMDN, terserapnya angkatan kerja, terdapat lembaga atau instansi yang berwenang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal (UPT PTSP), memberikan pelayanan seperti pendaftaran pelayanan PMDN, Ijin Prinsip Penanaman

Modal Dalam Negeri, Ijin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Papanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang berkerja lebih dari 1 wilayah kota atau kabupaten berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi, Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik, Pelatihan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri kepada masyarakat dunia usaha dan sosialisasi regulasi kebijakan penanaman modal asing dan negeri kepada masyarakat

- c. Program penyiapan potensi sumber daya pendukung. Dengan beberapa indikator yang akan dicapai ialah siapnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung terciptannya iklim investasi yang kondusif, sarana infrastruktur meliputi peningkatan sarana jalan raya, peningkatan sarana instalasi sumber energi, peningkatan sarana jalan rel, peningkatan sarana pelabuhan dan peningkatan sarana bandar udara. Sarana suprasutruktur meliputi lahirnya sejumlah produk regulasi yang mendukung kegiatan penanaman modal baik PMA atau PMDN, kualitas kepegawaian daerah yang paham tentang arti pentingnya kegiatan dan manfaat penanaman modal, dan rencana menggabungkan UPT PTSP dengan Badan Penanaman Modal Daerah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

C. Struktur Birokrasi dan Regulasi

1. Pada masa pemerintahan Gubernur Ali Mufiz

Pemilihan Gubernur pada tahun 2003-2008 menyatakan kemenangan dan secara resmi mengangkat pasangan Mardiyanto dan Ali Mufiz sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemenangan tersebut tidak lepas dari dukungan partai politik di kedua belah pihak. Gubernur Mardiyanto mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Gubernur mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dengan jumlah perolehan suara pada saat itu sebanyak 62 Suara.¹⁸ Di tahun 2006 Gubernur Jawa Tengah pada saat itu Mardiyanto diangkat menjadi

¹⁸ KPU Jawa Tengah, *Perolehan Suara Gubernur Jawa Tengah*, diakses dari <http://news.liputan6.com/read/59009/mardiyanto-gubernur-jateng>. Pada tanggal 19 Mei 2017. Pukul 20.00

Menteri Dalam Negeri. maka secara otomatis, Ali Mufiz yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah pada saat itu Menjadi Gubernur Jawa Tengah yang menggantikan Mardiyanto dan kursi DPRD praktis di dominasi oleh Partai PDI-P yang menjadi Parpol pendukung Ali Mufiz.

Regulasi yang dibuat oleh Gubernur Ali Mufiz mendapat dukungan penuh dari partai pendukungnya yaitu PDI-P. Termasuk Regulasi mengenai penanaman modal asing. Regulasi tersebut antara lain Meningkatkan investasi asing di Jawa Tengah dengan maksud dan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah, meningkatkan daya tarik daerah agar dilirik oleh investor asing, pemberian *Tax Holiday*¹⁹ pada sektor tertentu dan pemberian berdasarkan pada prinsip keadilan, perpanjangan masa hak guna usaha, menciptakan kondisi keamanan yang kondusif, dan memberikan kepastian hukum kepada investor asing. Anggota DPRD yang sebagian besar berasal dari Fraksi PDI-P memberikan dukungan penuh terhadap segala kebijakan yang telah di buat oleh Gubernur Ali Mufiz.

2. Pada masa pemerintahan Bibit Waluyo

Berakhirnya masa pemerintahan Gubernur Ali Mufiz di tahun 2008, secara hukum dan undang-undang Gubernur Ali Mufiz harus menyerahkan tongkat pemerintahannya kepada pasangan Bibit Waluyo dan Rustriningsih. Bibit Waluyo dan Rustriningsih memperoleh dukungan suara sebanyak 44,42 %. Perolehan dukungan suara tersebut merupakan andil besar dari Partai PDI-P sebagai Partai Politik Pendukung Bibit Waluyo dan Rustriningsih. Wilayah Provinsi Jawa Tengah ialah Kandang Banteng, Kandang Banteng ialah sebuah istilah khusus yang diberikan oleh Partai PDI-P kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah yang memberikan suara terbanyak kepada Partai PDI-P dan sebagai basis utama dukungan PDI-P. Sebagian besar dan mayoritas Calon dan wakil Gubernur selalu mendapat dukungan dari Partai PDI-P. Dengan mayoritas partai pendukung berasal dari PDI-P maka sebagian besar kursi Anggota DPRD mayoritas berasal dari Fraksi PDI-P.

Regulasi yang dibuat oleh Gubernur Bibit Waluyo mendapat dukungan penuh dari partai pendukungnya yaitu PDI-P yang secara mayoritas menjadi Fraksi terbanyak yang

¹⁹ Riwi Soemantyo, Meningkatkan daya Tarik Investasi, diakses dari <http://www.suamerdeka.com/harian/0307/30/kha1.htm>. Pada Tanggal 19 Mei 2017. Pukul 20.15

duduk di Kursi DPRD. Termasuk Regulasi mengenai penanaman modal asing. regulasi tersebut antara lain melakukan reformasi birokrasi di lembaga yang berwenang dalam hal penanaman modal, menerbitkan kebijakan yang sangat mendukung kebijakan investasi asing (Peraturan Gubernur Nomer 51 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Jawa Tengah Tahun 2012-2025), menghapus kebijakan yang dianggap menghambat kegiatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah, dan mulai melakukan kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan investasi asing di Jawa Tengah.